

PENGARUH PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Joko Suhariato¹, Harumi Ramadhani Lubis¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Penulis Korespondensi: djoko@unimed.ac.id, harumiramadhani50@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang hampir tidak mungkin dihapuskan dari muka bumi. Permasalahan pandemi covid sekarang ini juga memperparah peningkatan jumlah penduduk miskin baik secara global maupun di Indonesia khususnya juga di Provinsi Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS Provinsi tahun amatan 2007-2020. Adapun hasil penelitian ini adalah a) pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, b) inflasi pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dan c) secara simultan pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi variabel pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan sebesar 71,78 persen. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengangguran merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

Keywords: Kemiskinan, Pengangguran dan Inflasi

Article Information:

Received Date: 4 Juni 2022

Revised Date: 9 Juni 2022

Accepted Date: 11 Juni 2022

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu fenomena yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan menjadi masalah serius disetiap negara, bahkan di negara maju dan makmur sekalipun tetap ada kelompok masyarakat miskin. Meski kemiskinan takkan pernah terhapus, namun kemiskinan tak bisa dibiarkan karena kemiskinan disinyalir dapat menimbulkan banyak masalah lainnya seperti kejahatan sosial dan multiplier efek lainnya.

Menurut Maipita (2014) “kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar

hidup layak tidak tercapai”. Kondisi masyarakat dapat dikatakan miskin jika pendapatan/pengeluaran dibawah angka garis kemiskinan. Menurut Melbourne Institute (2012) garis kemiskinan dapat artikan sebagai tingkat pendapatan atau pengeluaran yang ditetapkan, dimana bila pendapatan seseorang dibawah tingkat tersebut, maka ia digolongkan miskin.

Tentunya masalah kemiskinan ini ada terjadi disetiap negara dibelahan dunia, termasuk Indonesia. Adapun perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia cukup berfluktuasi dari tahun ke tahunnya.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia pada Semester 1 Tahun Amatan 2011-2021

Berdasarkan Gambar 1 di atas, ditengah upaya Pemerintah menekan angka kemiskinan, ternyata efek pandemi covid 19 memperparah kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini. Terimbas efek pendemi covid mulai tahun 2020, tren negatif penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia terhenti, dan diprediksi akan terus meningkat. Menurut Lembaga *Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)* memproyeksikan dengan skenario pesimistis bahwa tingkat kemiskinan pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen, setara 29,3 juta penduduk miskin. Hal tersebut dipicu dari melemahnya anggaran perlindungan sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi (<https://www.republika.co.id/berita/r3jpk0370/ju>

[mlah-orang-miskin-melonjak-menjadi-293-juta-pada-2022](https://www.republika.co.id/berita/r3jpk0370/ju), diakses 1 juni 2022).

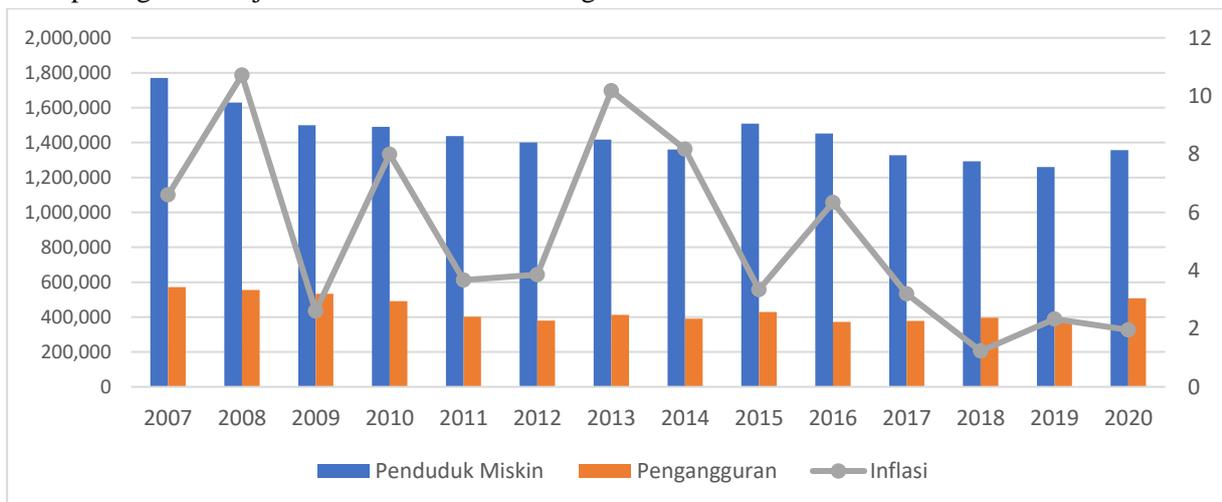
Tentunya ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan disuatu negara salah satunya adalah masalah pengangguran. Sama seperti kemiskinan, masalah pengangguran juga merupakan masalah universal yang bahkan terjadi dinegara maju dan makmur sekalipun. Menurut Todaro (2000), sebagian besar pengangguran adalah merupakan kelompok masyarakat paling miskin, yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang bekerja secara musiman. Namun tidak setiap orang yang tidak bekerja pasti miskin, selalu saja ditemukan pengangguran sukarela di negara berkembang, yaitu yang dengan mudah dapat memperoleh pekerjaan yang baik, tapi memilih menganggur

karna jenis pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan, kualifikasi kecakapan, aspirasi pribadi, target finansial maupun standar gengsi.

Selain masalah pengangguran, inflasi juga ditenggarai menjadi pemicu meningkatnya angka kemiskinan. Menurut Mankiw (2003) kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan, ketika laju inflasi bergulir dan nilai mata uang riil berfluktuasi sangat besar, maka inflasi yang meningkat pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan batas garis kemiskinan sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan mendorong

terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin, bila tidak diikuti oleh peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah.

Tidak hanya terjadi di level Indonesia, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan tentunya juga terjadi di level provinsi khususnya Provinsi Sumatera Utara. Berikut grafik data perkembangan kemiskinan, pengangguran, dan inflasi di Provinsi Sumatera Utara tahun amatan 2007-2021:



Gambar 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Pengangguran dan Inflasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun Amatan 2007-2021

Berdasarkan Gambar 2 di atas, bisa diamati bahwa data penduduk miskin, pengangguran dan inflasi yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara cenderung berfluktuasi. Fluktuasinya jumlah penduduk miskin ini tentunya tidak terjadi dengan sendirinya. Ada banyak faktor yang diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin tersebut. Salah satu variabel yang kerap dikaitkan dengan peningkatan penduduk miskin adalah pengangguran.

Menurut Arsyad (2016) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang sedang mencari kerja, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran disebabkan dari selisih tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat.

Hal ini diperkuat lagi dari pendapat Sukirno (2006) penambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pada penambahan tenaga kerja akan mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan (pengangguran). Kejadian tersebut akan menambah daftar penduduk miskin.

Kajian yang mengkaitkan antara pengangguran dengan kemiskinan sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori pengangguran memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti sebelumnya Primandari (2018), dan Mardiatillah dkk (2019). Namun ternyata hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset peneliti lainnya, Endrayani dan Dewi (2016) dan Susanto dkk (2017) menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Serta hasil penelitian Amalia (2012),

Hastin dan Siswadhi (2021), Septiani dan Muchtolifah (2022) dan Mufidah dkk (2022) yang menyatakan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan pengangguran dengan kemiskinan khususnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Selain pengangguran, variabel yang kerap dikaitkan dengan peningkatan penduduk miskin adalah Inflasi. Menurut Sukirno (2006) inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Akibat buruk yang paling nyata dari inflasi ialah kemerosotan pendapatan riil yang diterima masyarakat. Pendapatan pekerja-pekerja tidak selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan inflasi. Dengan demikian inflasi akan menurunkan pendapatan riil dari pekerja-pekerja berpendapatan tetap. Di samping itu inflasi dapat menimbulkan berbagai akibat buruk atas kegiatan dalam perekonomian yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan yang lambat dan pengangguran yang semakin meningkat.

Kajian yang mengkaitkan antara inflasi dengan kemiskinan sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori inflasi berdampak positif pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Endrayani dan Dewi (2016), Ningsih dan Andiny (2018), Primandari (2018), dan Mardiatillah dkk (2019). Namun ternyata, hal ini juga bertentangan dengan hasil riset lainnya, Amalia (2012) dan Susanto dkk (2017) menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Serta hasil penelitian Hastin dan Siswadhi (2021) yang menyatakan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tentunya kesenjangan hasil riset antar peneliti ini menjadi kajian menarik untuk mengungkap lebih jauh kaitan inflasi dengan kemiskinan khususnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai pendapat ahli dan hasil riset empiris mengkaitkan antara pengangguran dan inflasi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Namun, beragam hasil riset peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan (*research gap*), bahkan berlawanan dengan arah teori. Mempertimbangkan bahwa pengangguran, inflasi dan kemiskinan merupakan masalah yang umum terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, maka masalah kemiskinan dengan segala faktor yang mempengaruhinya ini semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah rangkaian penelitian khususnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara

KAJIAN PUSTAKA

a. Kemiskinan

Menurut Maipita (2014) kemiskinan adalah kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar sehingga standar hidup layak tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang dimaksud seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan dan kesehatan.

Secara umum teori-teori yang menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi dibedakan menjadi 2 pendekatan yakni pendekatan ekonomi dan pendekatan sosio-antropologi (non-ekonomi) khususnya tentang budaya masyarakat. Teori yang berbasis pada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kepemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, kebijakan yang bias, perbedaan kualitas sumberdaya manusia, serta rendahnya pembentukan modal masyarakat. Disisi lain, pendekatan sosio-antropologi menekankan adanya pengaruh budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan (kemiskinan kultural) (Maipita, 2014).

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk (Suryawati, 2005) yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja;

- 2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan;
- 3) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar;
- 4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

b. Pengangguran

Menurut Sukirno (2006) pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Hal senada juga diungkapkan Sumarsono (2009) pengangguran adalah seseorang atau lebih yang berada dalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau secara aktif sedang dalam pencarian pekerjaan.

Menurut Sukirno (2013) terdapat 3 kelompok angkatan kerja berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization approach*), antara lain: a) Menganggur (*Unemployed*) yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, b) Setengah menganggur (*Underemployed*) yaitu mereka yang bekerja tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, c) Bekerja Penuh (*Employed*) yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

Menurut Sukirno (2004) jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya:

- 1) Pengangguran normal atau friksional adalah jenis pengangguran yang disebabkan penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.

- 2) Pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang disebabkan merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat di dalam perekonomian dibanding penawaran agregatnya.

- 3) Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.

- 4) Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Sukirno (2004) penggolongan jenis pengangguran berdasarkan cirinya adalah:

- 1) Pengangguran terbuka yaitu pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja.

- 2) Pengangguran tersembunyi yaitu pengangguran ini tercipta sebagai akibat jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan.

- 3) Pengangguran bermusim yaitu pengangguran yang tercipta akibat musim yang ada, biasanya pengangguran ini terdapat di sektor pertanian dan perikanan.

- 4) Setengah menganggur yaitu pengangguran yang tercipta akibat tenaga kerja bekerja tidak sepenuh dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal.

c. Inflasi

Menurut Nopirin (2016) inflasi adalah proses kenaikan harga t harga umum barang-barang secara terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga t harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan, yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu.

Secara garis besar teori yang membahas tentang inflasi dapat dibagi dalam tiga kelompok dengan masing-masing menyoroti aspek- aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Ketiga teori inflasi menurut Boediono (2005) dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Teori Kuantitas

Teori ini dikenalkan oleh Irving Fisher, menurut teori ini inflasi terjadi karena adanya pengaruh dari banyaknya jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga.

2) Teori Keynes

Dalam teori Keynes, Inflasi terjadi karena adanya sebagian masyarakat yang hidup diluar dari batas ekonominya, sehingga permintaan masyarakat terhadap suatu barang akan melebihi jumlah yang telah tersedia. Biasanya masyarakat dalam golongan ini akan mengusahakan untuk memperoleh dana tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga segala bentuk keinginannya dapat terpenuhi.

3) Teori Strukturalis

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang, karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut defenisi faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Menurut teori ini, ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yakni ketidakelastisan penerimaan ekspor, dan ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri.

Dilihat dari faktor penyebab timbulnya inflasi, a) Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. b) Faktor penyebab *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. c)

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan (<https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/moneter/inflasi/default.aspx>, diakses 1 juni 2022).

4) Hipotesis

- Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
- Secara simultan pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan kepada masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dimana pembahasan dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel seperti: kemiskinan, pengangguran, dan inflasi di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Adapun data yang digunakan adalah data *time series* selama 14 tahun, mulai dari tahun 2007 – 2020.

Untuk itu, fungsi-fungsi yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

$$PMIS = f(PGG, INF) \quad \dots(1)$$

Dari persamaan 1, dispesifikasikan kedalam model dan ditransformasikan keadalam bentuk logaritma pada persamaan sebagai berikut:

$$L(PMIS) = \beta_0 - \beta_1 L(PGG) + \beta_2 L(INF) + e \dots(2)$$

Keterangan:

PMIS	= Penduduk Miskin (Orang)
PGG	= Pengangguran (Orang)
INF	= Inflasi (Persen)
L	= Logaritma
β_0	= Konstanta
β_1 -- β_2	= Koefisien regresi
e	= Variabel gangguan (<i>error term</i>)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun uji asumsi yang digunakan yakni uji normalitas, uji autokorelasi, multikolinearity dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil penelitian ini mengkaji pengaruh parsial, pengaruh simultan dan koefisien determinasi. Seluruh pengolahan data penelitian ini menggunakan alat analisis Eviews 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

1. Uji Asumsi Klasik

- a) Uji Normalitas. Kriteria nilai Prob. *Jarque Bera* (JB) > 0,05 artinya H_0 diterima berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi normalitas atau pengganggu/residual terdistribusi secara normal. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Prob. Jarque Bera sebesar 0,6131 > 0,05,

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji normalitas dalam model penelitian ini.

- b) Uji Autokorelasi. Hasil *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan kriteria jika nilai prob. Obs*R-squared > 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada penelitian ini. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa Prob. sebesar 0,3103 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji autokorelasi dalam model penelitian ini.
- c) Uji Heteroskedastisitas. Hasil *Breusch-Pagan-Godfrey: Heteroskedasticity Test* dengan kriteria jika nilai Prob. Obs*R-squared > 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model penelitian ini. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa Prob. sebesar 0,4723 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.
- d) Uji Multikolinearity. Hasil uji *Variance Inflation Factors* dengan kriteria jika nilai *Centered VIF* < 10, maka tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearity pada model penelitian ini. Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa nilai *Centered VIF* sebesar 0,1.0464 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearity dalam model penelitian ini.

Adapun hasil uji asumsi dan uji hipotesis regresi model OLS penelitian ini dirangkum pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi dan Uji Regresi Model OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.206621	1.220152	7.545468	0.0000
LOG(PGG)	0.376340	0.094427	3.985507	0.0021
LOG(INFLASI)	0.057435	0.022439	2.559580	0.0265
R-squared	0.717790	Durbin-Watson stat		1.5011
F-statistic	13.98905	Prob (F-statistic)		0.00095
Normalitas	Prob (Jarque-Bera)			0.6131
Autokorelasi	Prob (Breusch-Godfrey SC LM Test)			0.3103
Heteroskedastisitas	Prob (Breusch-Pagan-Godfrey Test)			0.4723
Multikolinearity	Centered Variance Inflation Factors			1.0464

Sumber: Hasil Olah Data (2022)

2. Uji Hipotesis

a) Uji Simultan

Secara simultan variabel pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan prob. sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima.

b) Uji Parsial

1) Ada pengaruh positif dan signifikan variabel pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan prob. sebesar $0,0021 < 0,05$, maka H_a diterima.

2) Ada pengaruh positif dan signifikan variabel inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan prob. sebesar $0,0265 < 0,05$, maka H_a diterima.

c) Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui nilai *R-Squared* sebesar 0,7178, artinya ada sebanyak 71,78 persen kontribusi variabel jumlah penduduk miskin bisa dijelaskan melalui variabel pengangguran dan inflasi. Sedangkan sisanya 28,22 persen dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

d) Pembahasan Model Analisis

Adapun persamaan regresi yang dihasilkan dari model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$L(\text{PMIS}) = 9,2066 + 0,3763 L(\text{PGG}) + 0,0574 L(\text{INF}) + e$$

Berdasarkan koefisien di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

a) Konstanta sebesar 9,2066 menunjukkan bahwa jika variabel bebas seperti pengangguran dan inflasi adalah konstan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,206 persen.

b) Setiap kenaikan pengangguran sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin Prov. Sumatera Utara sebesar 0,3763 persen dengan asumsi ceteris paribus.

c) Setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin Prov. Sumatera Utara sebesar 0,0574 persen dengan asumsi ceteris paribus.

b. Pembahasan

1. Variabel Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Prov. Sumatera Utara

Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di

Provinsi Sumatera Utara, artinya hipotesis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Primandari (2018), Mardiatillah dkk (2019), dan Mufidah dkk (2022). Hasil penelitian ini menguatkan pendapat Arsyad (2010) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa salah satu sumber utama kemiskinan adalah pengangguran. Hal ini bisa dipahami, tingginya tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja, maka akan menciptakan pengangguran. Semakin tingginya biaya hidup setiap hari, tidak adanya pekerjaan tentunya akan berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat, serta kualitas hidup yang tidak layak karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukirno (2004) menyatakan bahwa pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat.

Meskipun dalam berbagai situasi ada kelompok masyarakat yang sengaja menganggur karena lebih memilih pekerjaan yang relevan dengan kompetensinya. Hal ini diperkuat dari pendapat Todaro (2000) yang menyatakan bahwa tidak setiap orang yang tidak bekerja pasti miskin, selalu saja ditemukan pengangguran sukarela yang mudah mendapatkan pekerjaan, tapi memilih menganggur karna jenis pekerjaan tidak sesuai dengan pendidikan, kualifikasi kecakapan, aspirasi pribadi, target finansial maupun standar gengsi.

Berbagai pendapat para ahli dan hasil studi empiris penelitian ini semakin meyakinkan dan menguatkan bahwa semakin tinggi tingkat

pengangguran, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah.

2. Variabel Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, artinya hipotesis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara teruji kebenarannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Endrayani dan Dewi (2016), Ningsih dan Andiny (2018), Primandari (2018), dan Mardiatillah dkk (2019). Banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa salah faktor utama kemiskinan adalah inflasi. Kenaikan harga terus menerus akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat, sehingga daya beli masyarakat rendah. Ketika daya beli yang rendah, maka tingkat konsumsi masyarakat juga rendah. Rendahnya daya beli dan tingkat konsumsi ini akan berpengaruh besar pada menurunnya tingkat kesejahteraan untuk pemenuhan standar hidup layak. Tentunya jika meningkat harga kebutuhan pokok, maka akan menaikkan garis kemiskinan, sehingga jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Hal ini diperkuat dari pendapat Mankiw (2003) bahwa kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan. Ketika laju inflasi bergulir dan nilai mata uang riil berfluktuasi sangat besar, maka inflasi yang meningkat pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan batas garis kemiskinan sebagai akibat dari peningkatan laju inflasi akan mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin.

Berbagai pendapat para ahli dan hasil studi empiris penelitian ini semakin meyakinkan dan menguatkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan hasil penelitian ini adalah secara simultan dan parsial pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Kontribusi pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 71,78 persen. Sedangkan variabel yang paling dominan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara adalah pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran penelitian ini adalah signifikannya pengaruh pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin mendesak pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk lebih bisa menghidupkan iklim investasi, mendatangkan investor dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar dari peningkatan jumlah angkatan kerja. Pembukaan lapangan kerja yang lebih mempertimbangkan industri padat karya agar penyerapan tenaga kerja dari kelompok pengangguran semakin optimal.

Pemerintah melalui Bank Indonesia perlu melakukan upaya ketat untuk menstabilkan inflasi yang ada. Selain itu, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara juga turut andil dalam mengawasi dan mengendalikan distribusi barang khususnya kebutuhan pokok (sembako) agar harga kebutuhan pokok tersebut lebih stabil.

Kepada peneliti yang akan datang, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah industri dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Fitri. 2012. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. **Econo Sains**. Vol. X (2), 2012.

Arsyad, Lincoln. 2010. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

_____. 2016. **Ekonomi Pembangunan**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Boediono. 2005. **Ekonomi Moneter**. Yogyakarta: BPFE UGM.

Endrayani, N. K. E, dan Dewi, M, H, U. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. **E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana**. Vol. 5.1 (2016) : 63-88.

Ghozali, Imam. 2011. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hastin, M. dan Siswadhi, F. 2021. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi. **Jurnal Ekonomi Sakti**. Vol. 10 (1), 2021.

Maipita, Indra. 2014. **Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan**. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mankiw, N. Gregory. 2003. **Teori Makro Ekonomi** Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiatillah, R. Panorama, M., Sumantri, R. 2019. Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera selatan tahun 2015-2019. **Kinerja**. Vol. 18 (2), 2021:279-287.

Melbourne Institute. 2012. **Poverty Line: Australia, March Quarter 2012**. Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. The University of Melbourne.

Mufidah, R. Asrudi, Susiani. 2022. Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. **Jurnal Education and Development**. Vol.10 (2), Mei 2022

Ningsih, D. dan Andiny, P. 2018. Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. **Jurnal Samudra Ekonomika**. Vol. 2 (1), April 2018.

- Nopirin. 2016. **Ekonomi Moneter**. Buku 2. Yogyakarta: BPFE UGM
- Primandari (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol. 16 (1): 1-10, Juni 2018
- Septiani, G, C. dan Muchtolifah. 2022. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk Dan Tingkat Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat. **ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**. Vol. 1 (5), April 2022
- Sukirno, Sadono. 2004. **Pengantar Teori Makro Ekonomi**. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. **Pengantar Teori Makro Ekonomi**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. **Makro Ekonomi, Teori Pengantar**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sumarsono, Sonny. 2009. **Teori dan kebijakan publik Ekonomi Sumber Daya Manusia**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suryawati, C. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. **JMPK**. Vol. 8(3).
- Susanto, E., Rochaida, E., Ulfah, Y. 2017. Pengaruh inflasi dan pendidikan terhadap pengangguran dan kemiskinan. **INOVASI**. Vol. 13 (1), 2017, 19-27
- Todaro, Michael P. 2000. **Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga**, Edisi Kedelapan. Jakarta : Erlangga.
- _____. <https://www.republika.co.id/berita/r3jpk0370/jumlah-orang-miskin-melonjak-menjadi-293-juta-pada-2022>, diakses 1 Juni 2022.
- _____. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>, diakses 1 Juni 2022